

**PENGARUH *LEVERAGE*, *FIXED ASSET INTENSITY RATIO*,
DAN *INVENTORY INTENSITY RATIO* TERHADAP *TAX*
*PLANNING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property &
Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Oleh:

ALDI KENTJANA

20150100014

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2019

**PENGARUH *LEVERAGE*, *FIXED ASSET INTENSITY RATIO*,
DAN *INVENTORY INTENSITY RATIO* TERHADAP *TAX*
*PLANNING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property &
Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

ALDI KENTJANA

20150100014



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2019

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aldi Kentjana
NIM : 20150100014
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 21 Februari 2019

Menyetujui,

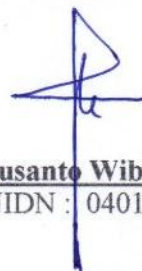
Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,



Ety Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Aldi Kentjana

NIM : 20150100014

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 28 Mei 2019

Menyetujui,

Pembimbing,

Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Handwritten initials 'F' and '04' in blue ink.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Aldi Kentjana

NIM : 20150100014

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 28 Mei 2019


Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,


Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

F 09

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aldi Kentjana
NIM : 20150100014
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"SANGAT MEMUASKAN"** oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**
NIDN: 0407025901



Penguji I : **Limajatini, S.E., M.M., BKP.**
NIDN: 0413026706



Penguji II : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0401118204



A
09.

Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.
NIDN: 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 28 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Aldi Kentjana

NIM : 20150100014

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20150100014
Nama : Aldi Kentjana
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Perminatn : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh *Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio* dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 12 Agustus 2019

Penulis



(Aldi Kentjana)

Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, *fixed asset intensity ratio*, dan *inventory intensity ratio* terhadap *tax planning*. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan jasa sub sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2017.

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan selama periode 3 tahun pengamatan berturut-turut sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 57. Data penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini yang telah diolah, menunjukkan bahwa nilai signifikan *leverage* yang diproksikan dengan menggunakan DAR yaitu 0,487, nilai signifikan *fixed asset intensity ratio* yang diproksikan dengan menggunakan FAIR yaitu 0,005, nilai signifikan *inventory intensity ratio* yang diproksikan dengan menggunakan IIR yaitu 0,023.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax planning*, sedangkan *fixed asset intensity ratio* dan *inventory intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *tax planning*.

Kata Kunci : *Tax Planning*, *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*.

The Effect of Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio, and Inventory Intensity Ratio on Tax Planning (Empirical Study on Property & Real Estate Sub Sector Services Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2017 Period)

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of leverage, fixed asset intensity ratio, and inventory intensity ratio on tax planning. The population in this study is audited financial statements for property & real estate sub-sector service companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017.

Determination of the sample was done using purposive sampling with a total sample of 19 companies over a period of 3 consecutive years so that the total sample obtained was 57. The data of this study used SPSS version 25 with descriptive statistical test, classic assumption test, multiple linear regression analysis test and test the hypothesis.

The results of this research that have been processed show that the significant value of leverage proxied by using DAR is 0.487, the significant value of fixed asset intensity ratio proxied by using FAIR is 0.005, the significant value of inventory intensity ratio is proxied by using IIR, which is 0.023.

The results of the study show that leverage does not have a significant effect on tax planning, while fixed asset intensity ratio and inventory intensity ratio have a significant effect on tax planning.

Keywords: Tax Planning, Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat, rahmat dan karunianya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017” ini dengan baik pada waktu yang telah ditentukan.

Pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Buddhi Dharma. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin memberi ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sofian Sugioko, M.M., CPMA selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua saran yang diberikan oleh ibu selama proses penulisan proposal hingga terlaksananya sidang skripsi.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan serta staff-staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Keluarga tercinta, yaitu orang tua serta adik yang selama ini selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa selama ini.
7. Untuk teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Tangerang, 28 Mei 2019



Aldi Kentjana



DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Gambaran Umum Teori	9
1. Teori Umum Perpajakan.....	9
2. <i>Tax Planning</i>	18
3. <i>Leverage</i>	28
4. <i>Fixed Asset Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Aset Tetap).....	34
5. <i>Inventory Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Persediaan).....	40
B. Hasil Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pemikiran	50
D. Perumusan Hipotesa.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Objek Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Populasi dan Sampel	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	62
1. Variabel Dependen	62
2. Variabel Independen.....	63
2.1 <i>Leverage</i>	63
2.2 <i>Fixed Asset Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Aset Tetap)	65
2.3 <i>Inventory Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Persediaan)... ..	66
G. Teknik Analisis Data.....	67
1. Statistik Deskriptif.....	68
2. Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Normalitas	68
b. Uji Multikolonieritas	69
c. Uji Autokorelasi	71
d. Uji Heteroskedastisitas	72
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
4. Uji Hipotesis.....	74
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	74
b. Uji Simultan F.....	75
c. Uji Parsial t.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	78
1. <i>Tax Planning</i>	78
2. <i>Leverage</i>	82
3. <i>Fixed Asset Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Aset Tetap).....	85

4. <i>Inventory Intensity Ratio</i> (Rasio Intensitas Persediaan).....	88
B. Analisis Hasil Penelitian	91
1. Hasil Statistik Deskriptif	91
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	94
a. Hasil Uji Normalitas.....	94
b. Hasil Uji Multikolonieritas.....	96
c. Hasil Uji Autokorelasi.....	97
d. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	99
3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	101
C. Pengujian Hipotesis.....	103
a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	103
b. Hasil Uji Simultan F.....	104
c. Hasil Uji Parsial t.....	105
D. Pembahasan.....	107
1. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Planning</i>	107
2. Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity Ratio</i> terhadap <i>Tax Planning</i> ..	108
3. Pengaruh <i>Inventory Intensity Ratio</i> terhadap <i>Tax Planning</i>	109
4. Pengaruh <i>Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio</i> terhadap <i>Tax Planning</i>	110
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Implikasi.....	112
1. Implikasi Teoritis.....	112

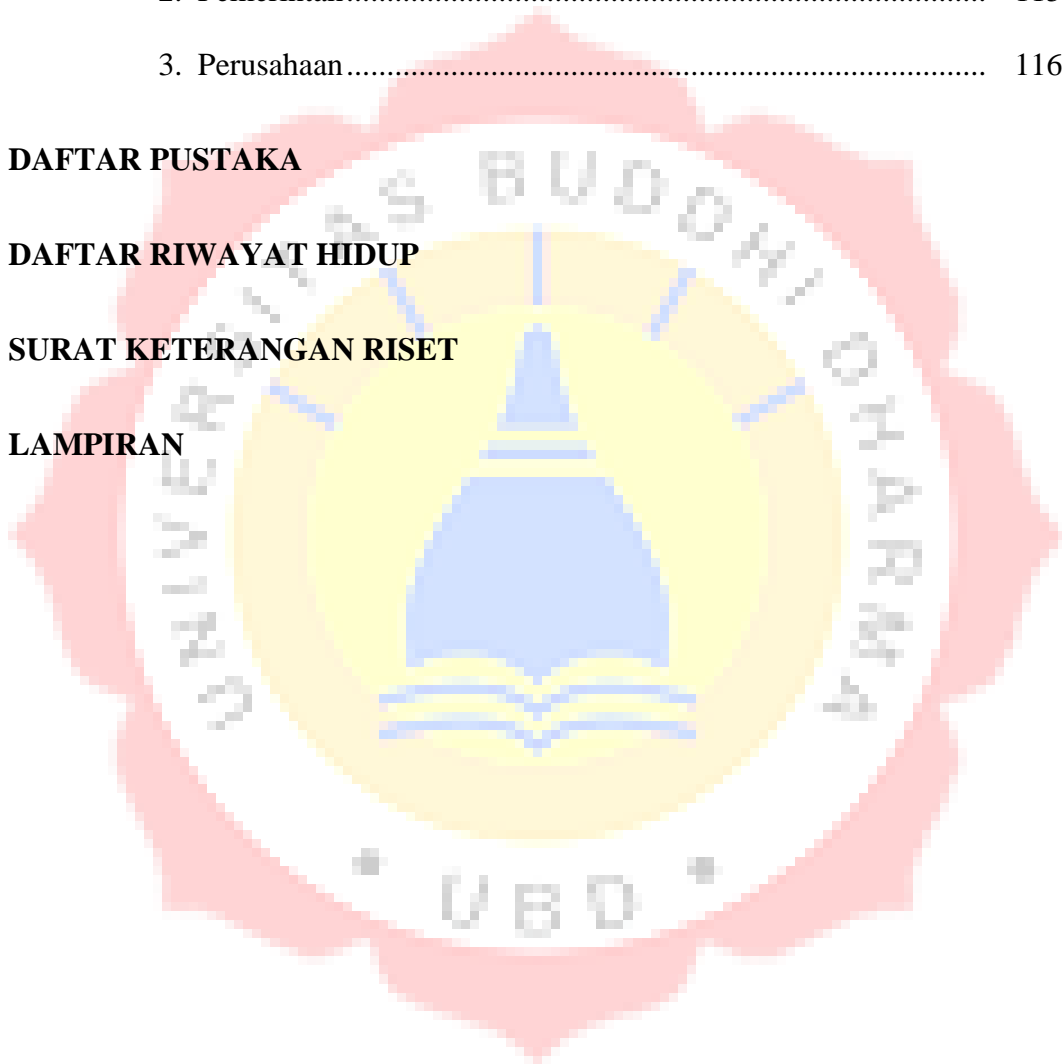
2. Implikasi Manajerial.....	113
3. Implikasi Metodologi	114
C. Saran.....	114
1. Peneliti Selanjutnya.....	114
2. Pemerintah.....	115
3. Perusahaan.....	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN

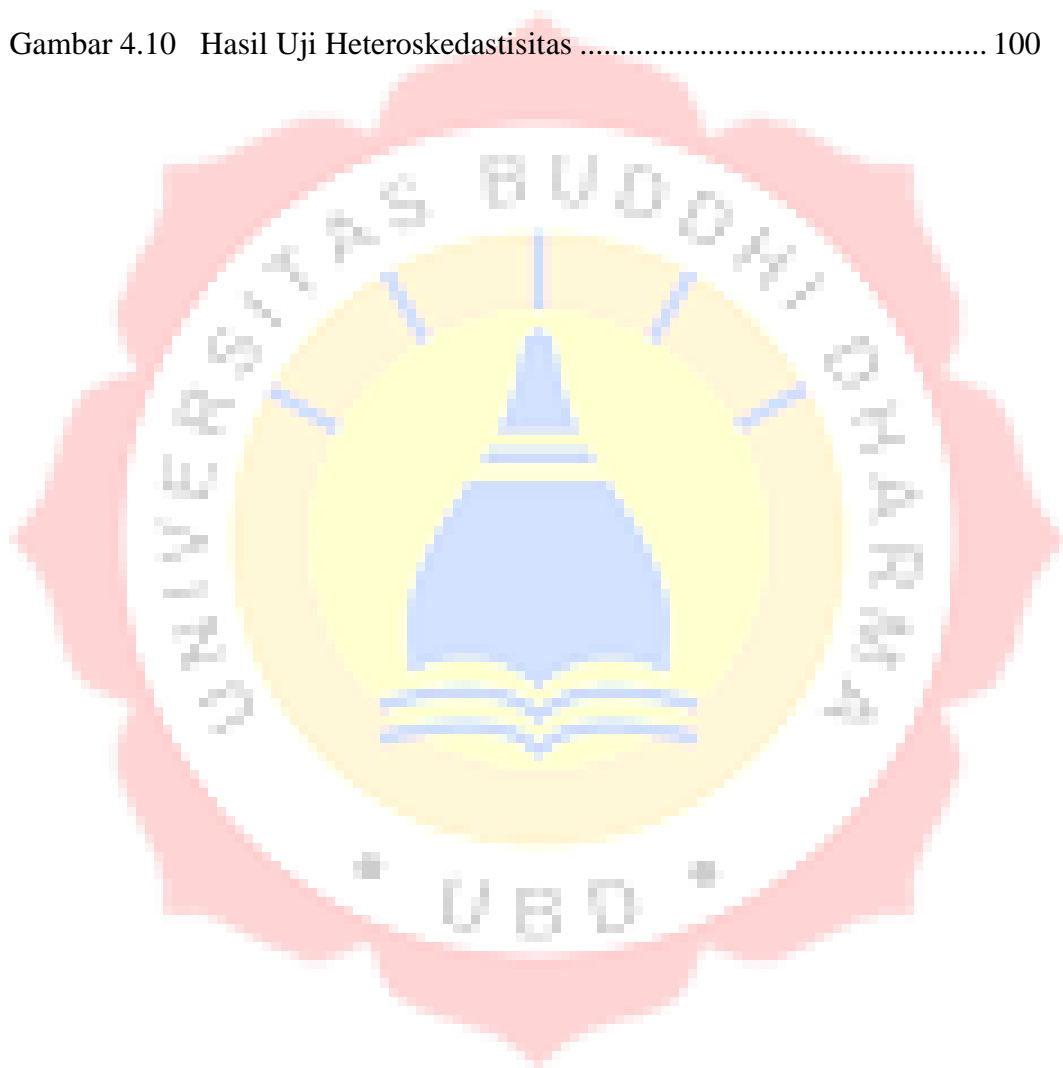


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1	Penentuan Jumlah Sampel Penelitian	59
Tabel 3.2	Daftar Nama dan Kode Perusahaan	60
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel	67
Tabel 3.4	Klasifikasi Nilai d	71
Tabel 3.5	Nilai Interpretasi Koefisien	75
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan ETR	79
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan DAR	82
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan FAIR	85
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan IIR	88
Tabel 4.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif	92
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	95
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolonieritas	97
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	98
Tabel 4.9	Hasil Uji Runs Test	99
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	101
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	103
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan F	105
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial t	106

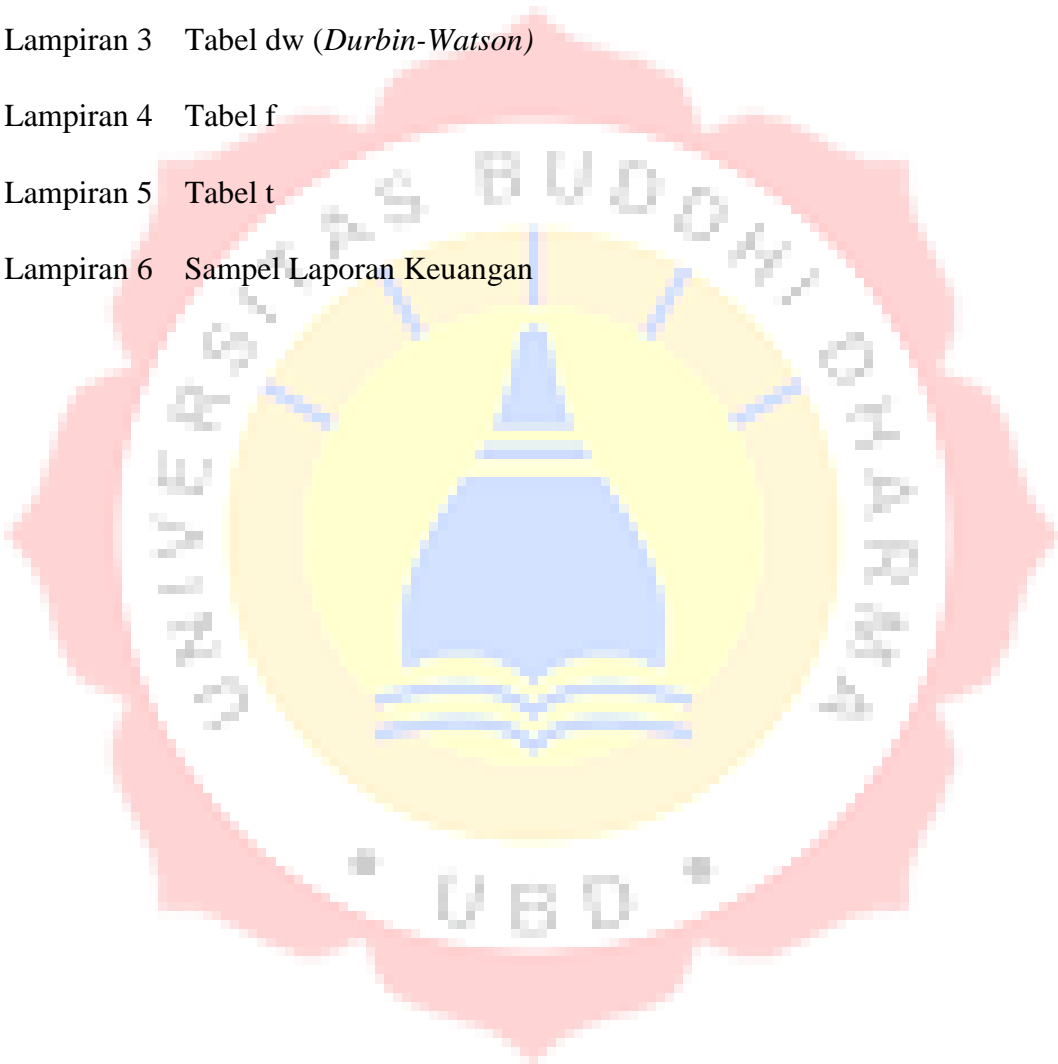
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	51
Histogram pada Hasil Uji Normalitas.....	95
Gambar 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	100



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Survei & Riset
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS
- Lampiran 3 Tabel dw (*Durbin-Watson*)
- Lampiran 4 Tabel f
- Lampiran 5 Tabel t
- Lampiran 6 Sampel Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang penting dalam suatu negara khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. (Ardyansah dan Zulaikha 2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan oleh karena itu perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penerimaan pajak

harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil beban pajak tersebut baik secara legal maupun illegal sehingga mereka dapat mencapai target laba yang telah ditetapkan sebelumnya.

Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak ini antara lain dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk memperkecil jumlah kewajiban perusahaan dalam hal pembayaran pajak dan tindakan ini merupakan tindakan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal didalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak dimaksudkan untuk dapat menseleksi segala jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan, diantaranya *leverage*, *fixed asset intensity ratio* dan *inventory intensity ratio*. *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan (Putri, Nazar, dan Kurnia 2018). Teori Akuntansi Positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan.

Fixed Asset Intensity Ratio juga disebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tindakan perencanaan pajak ini. Ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebelum perhitungan pajak menurut standar akuntansi dan tidak bertentangan dengan hukum pajak. Proporsi aset tetap yang lebih besar akan menyebabkan beban depresiasi yang semakin besar pula, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak akan semakin kecil. Perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan

untuk membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih kecil.

Faktor selanjutnya yaitu *inventory intensity ratio*, yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, yang nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak. Intensitas persediaan menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu. Rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti: Pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam permasalahan *tax planning* yaitu :

- 1) Adanya *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) yang dilakukan perusahaan melalui *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yaitu upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 2) Adanya upaya untuk meminimalkan beban pajak tangguhan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan.
- 3) Selain adanya kondisi keterbatasan keuangan yang dialami perusahaan, terdapat faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap tindakan perencanaan pajak. Hal ini meliputi diantaranya penggunaan hutang sebagai pembiayaan perusahaan yang diwakilkan oleh *leverage* karena hutang perusahaan pun akan dimasukkan dalam penghitungan pajak.
- 4) *Fixed Asset Intensity Ratio* dan *Inventory Intensity Ratio* dapat mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk

menghasilkan pendapatan, jadi *Fixed Asset Intensity Ratio* dan *Inventory Intensity Ratio* dapat menjadi indikator perusahaan dalam memperebutkan pasar.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Planning*?
- 2) Apakah *Fixed Asset Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Planning*?
- 3) Apakah *Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Planning*?
- 4) Apakah *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Planning*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Planning*.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *Fixed Asset Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* maupun tindakan *Tax Planning*.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi Gambaran Umum Teori terkait Variabel Independen dan Dependen, Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Operasionalisasi Variabel Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data Hasil Penelitian Variabel Independen dan Dependen, Analisis Hasil Penelitian, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Umum Perpajakan

Salah satu cara negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi 2017, 1) mengatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo 2016, 3) mengatakan

bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo 2016, 3) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

1.1 Prinsip Perpajakan

Menurut (Halim, Bawono, dan Dara 2016, 2) terdapat tiga prinsip utama perpajakan yaitu :

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic effects must be considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016, 4) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1.3 Teori Perpajakan

Terdapat beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat (Halim, Bawono, dan Dara 2016, 4) yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya.

3. Teori Daya Pikul

Menyimpulkan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

4. Teori Bakti

Didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak yaitu untuk mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu, yaitu kesejahteraan.

1.4 Jenis Pajak

Menurut (Halim, Bawono, dan Dara 2016, 5) terdapat dua jenis pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Halim, Bawono, dan Dara 2016, 6) menjelaskan tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggaran

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal diwilayahnya.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak

diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Tax Planning*

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Namun tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Sehingga hal ini akan memicu perusahaan melakukan strategi untuk menghindari pajak yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) atau dengan agresivitas pajak. *Tax Planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan

dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan untuk dapat menyeleksi tindakan penghematan yang harus dilakukan.

Menurut (Pohan 2017, 13) mengatakan bahwa :

“*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Tax Planning itu sendiri merupakan proses atau cara legal yang dilakukan oleh wajib pajak agar hutang pajak yang berada dalam jumlah yang paling minim, tetapi tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tindakan perencanaan pajak ini tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, akan tetapi para wajib pajak berusaha memanfaatkan peluang berkaitan peraturan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Jika tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi memiliki tujuan yang berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Menurut (Pohan 2017, 18) ada beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, yaitu :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan

Semakin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar

Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda

Semakin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari paparan faktor-faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang semakin rumit akan meningkatkan biaya untuk mematuhi. Untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak dengan biaya yang murah diperlukan perencanaan pajak antara lain dengan merekrut tenaga ahli dibidang tersebut.
- b. Jumlah pajak terutang yang semakin besar akibat kekeliruan dan kesalahan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan *tax litigation* yaitu menyelesaikan perselisihan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
- c. Perencanaan pajak diperlukan agar pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengundang pemeriksaan dari otoritas pajak.
- d. Semakin baik moral masyarakat, maka akan semakin rendah keinginannya untuk melakukan perencanaan pajak.

Menurut (Pohan 2017, 20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut (Pohan 2017, 21) secara umum terdapat tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik, yaitu :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Dari beberapa poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memanfaatkan berbagai biaya untuk memaksimalkan pendapatan bersih setelah pajak dan meminimalisasi kejutan pajak bila terjadi pemeriksaan pajak. Yang dimaksud kejutan pajak adalah adanya kebijakan dadakan dalam manajemen pajak yang harus dikeluarkan.

Adapun contoh-contoh yang dapat memberikan gambaran tentang tindakan perencanaan pajak ini yaitu :

1) *Tax Saving*

Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh : Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai

biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta dan PPh badan tidak bersifat final).

2) *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Contoh : Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi secara fiskal

atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun – tahun sebelumnya.

3) Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Contoh : Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak dibidang manufacturing, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75 % dari nilai pajak yang dikreditkan (

untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008). Bila dikreditkan, maka seluruh jumlah pajak diklaim oleh wajib pajak. Akan tetapi bila dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 23 %, itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan deductible expenses (biaya yang dapat dikurangkan).

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar

Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 % dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25.

Menurut (Pohan 2017, 23) menyebutkan adanya beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu :

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana periode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

b. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan.

c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat

dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2. Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Menurut (Husnan 2017, 212) mengatakan bahwa :

“*Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, yang berarti mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya”.

Menurut (Utari, Purwanti, Prawironegoro 2014, 263) mengatakan bahwa :

“*Leverage* adalah upaya untuk meningkatkan harta perusahaan dengan utang dengan tujuan dapat meningkatkan laba operasi perusahaan”.

Menurut (Fahmi 2016, 73) mengatakan bahwa :

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang”.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka lahir dua macam *leverage* (Utari, Purwanti, Prawironegoro 2014, 199) yaitu:

1. *Leverage* operasi (*operating leverage*)

Yaitu penggunaan aset teknologi yang tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output yang tinggi, konsekuensinya melahirkan biaya tetap tinggi, seperti penyusutan, pemeliharaan aset, asuransi, dsb.

2. *Leverage* keuangan (*financial leverage*)

Yaitu penggunaan utang tinggi untuk menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi, konsekuensinya melahirkan beban bunga tinggi.

Makin tinggi *leverage* perusahaan, makin tinggi risikonya. Biaya tetap tinggi berakibat *leverage* operasi tinggi, perusahaan akan berbahaya jika margin kontribusi tidak mampu menutup biaya tetap tersebut. Beban bunga tinggi berakibat *leverage*

keuangan makin tinggi, perusahaan berbahaya jika laba operasi tidak mampu menutup beban bunga tersebut.

Menurut (Brigham dan Houston 2014, 140) *leverage* keuangan adalah tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan, dimana memiliki tiga dampak penting yaitu :

- a. Menghimpun dana melalui utang membuat pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.
- b. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang diberikan pemilik sebagai batas pengaman. Jadi semakin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi kreditor.
- c. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi dari tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan mengungkit atau memperbesar pengembalian atas ekuitas.

Secara umum ada 7 (tujuh) rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (Fahmi 2016, 72) yaitu:

1. *Debt to Total Asset* atau *Debt Ratio*

$$Debt\ to\ Total\ Asset = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

Dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset.

2. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Mendefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.

3. *Times Interest Earned*

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

Disebut juga dengan rasio kelipatan, semakin tinggi rasio kelipatan maka pembayaran bunga semakin baik, namun jika sebuah perusahaan menghasilkan laba yang tinggi tetapi tidak ada arus kas dari operasi, maka arus kas ini menyesatkan.

4. *Cash Flow Coverage*

$$\text{Cash Flow Coverage} = \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Penyusutan} / \text{Beban Tetap} + \text{Deviden Saham Preferen} + \text{Deviden Saham Preferen} (1-\text{tax})}{(1-\text{tax})}$$

Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Biaya tetap adalah biaya yang tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama perusahaan tersebut terus menjalankan aktivitasnya. Pajak adalah kewajiban perusahaan yang harus selalu dibayar kepada pihak yang berkepentingan, yang mana kemudian pendapatan dari pembayar pajak tersebut dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. *Long-Term Debt to Total Capitalization*

$$\text{Long-Term Debt to Total Capitalization} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Hutang Jangka Panjang} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

Long term debt merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang.

6. *Fixed Charge Coverage*

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{Laba Usaha} + \text{Beban Bunga}}{\text{Beban Bunga} + \text{Beban Sewa}}$$

Disebut juga dengan rasio menutup beban, dimana adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha.

7. *Cash Flow Adequacy*

$$\text{Cash Flow Adequacy} = \frac{\text{Arus Kas dari Aktivitas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal} + \text{Pelunasan Utang} + \text{Bayar Deviden}}$$

Disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas, dimana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran deviden tiap tahunnya.

3. ***Fixed Asset Intensity Ratio (Rasio Intensitas Aset Tetap)***

Fixed Asset Intensity ratio atau yang biasa dikenal sebagai *capital intensity ratio* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (modal). Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal

dapat diperoleh dari pembelian serta penjualan aset tetap dengan alasan bahwa untuk mendanai kegiatan perusahaan.

Menurut (Subramanyam 2017, 268) mengatakan bahwa :

“Aset tetap merupakan aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam berbagai proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode”.

Menurut (Diana dan Setiawati 2017, 213) mengatakan bahwa :

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut (Martani *et al.* 2016, 271) mengatakan bahwa :

“Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik berbeda dengan paten atau merk dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik; mempunyai tujuan penggunaan khusus yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk dinetralkan kepada pihak lain atau dengan tujuan administratif; aset tetap termasuk kedalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi”.

Dapat disimpulkan bahwa suatu benda berwujud dapat diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap sesuai dengan ketentuan akuntansi komersial apabila (Waluyo 2016, 109) :

1. Manfaat keekonomian masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan mengalir kedalam perusahaan.

2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Berdasarkan gambaran tersebut diperlukan adanya penilaian tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi masa akan datang sesuai bukti-bukti yang ada. Kepastian ini tersedia apabila risiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Hal lainnya adalah adanya pengakuan langsung, sebagai contoh transaksi pertukaran karena mempunyai bukti pembelian aset yang memberikan identifikasi biayanya. Demikian pula apabila aset dibuat sendiri, pengukuran dari sisi biaya dapat dibuat melalui transaksi dengan pihak luar perusahaan dan perusahaan mengakumulasi biaya yang digunakan dalam proses penyelesaian, sehingga agar memenuhi suatu klasifikasi sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.

Biaya perolehan ini terdiri atas harga beli, termasuk bea impor, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap dipakai atau berada ditempat. Biaya yang dapat diatribusikan contohnya adalah biaya persiapan tempat, pengiriman awal, penyimpanan, bongkar muat, pemasangan, dan biaya profesional.

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset tetap pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Sebagai komponen biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi berikut ini (Waluyo 2016, 110) :

1. Harga perolehan

Dalam komponen harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Biaya yang diatribusikan secara langsung meliputi biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan panrik, biaya *handling* dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian, dan komisi profesional.

3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya-biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan.

Pengakuan terhadap biaya dalam jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang

diinginkan agar siap digunakan sesuai yang diinginkan dan maksud manajemen. Dari hal tersebut, sehingga biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan kedalam jumlah tercatat aset. Beberapa contoh yang dikategorikan sebagai biaya yang tidak termasuk jumlah tercatat yaitu :

1. Biaya-biaya yang terjadi saat aset telah mampu beroperasi sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen namun belum dipakai atau masuk beroperasi dibawah kapasitas penuhnya.
2. Kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap keluaran masih rendah.
3. Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa manfaat aset tetap. Masa manfaat diukur dengan periode suatu periode suatu aset yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan.

Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut (Waluyo 2016, 120) :

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Seperti diketahui dalam akuntansi komersial, aset tetap yang dapat disusutkan sering kali merupakan bagian signifikan aset perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan posisi keuangan dari hasil usaha.

Adapun persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan (Waluyo 2016, 121), yaitu meliputi :

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud.
2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu :

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil.
2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan.

Dengan demikian, harta yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat di atas, tidak boleh disusutkan. Apabila terjadi penjualan, maka laba atau rugi dihitung dengan mengurangi harga perolehan terhadap harga jual.

Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurangan beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio yang lebih kecil. Biaya depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan mengakibatkan depresiasi yang besar juga sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak berkurang.

4. *Inventory Intensity Ratio (Rasio Intensitas Persediaan)*

Menurut (Agoes 2013, 53) mengatakan bahwa :

“Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja”.

Menurut (Subramanyam 2017, 255) mengatakan bahwa :

“Persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan”.

Menurut (Diana dan Setiawati 2017, 179) mengatakan bahwa :

“Persediaan meliputi aset yang :

1. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
2. berada dalam proses produksi untuk dijual; atau,
3. dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”.

Menurut (Martani *et al.* 2016, 245) mengatakan bahwa :

“Dapat dikatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada *nature business* suatu entitas. Pada perusahaan properti misalkan, properti yang dimiliki seperti apartemen, perumahan dan gedung yang dijual dapat diklasifikasikan sebagai persediaan karena properti tersebut merupakan aset yang dijual untuk kegiatan usahanya yang bergerak dibidang penjualan properti. Namun bagi entitas lain yang kegiatan usahanya bukan penjualan properti, kepemilikan atas properti tersebut tidak diklasifikasikan sebagai persediaan, melainkan dapat sebagai aset tetap atau aset tidak lancar yang dipegang untuk dijual, tergantung pada tujuan kepemilikannya”.

Salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh suatu entitas adalah terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. Secara teknis, seharusnya suatu entitas mencatat pembelian atau penjualan atas persediaan ketika telah

mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun sering kali penentuan atas perpindahan hak kepemilikan tersebut relatif sulit untuk dilakukan.

Klasifikasi dari barang dalam persediaan mencakup :

- i. Barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya.
- ii. Barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya.
- iii. Barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut.

Persediaan dapat pula dikaitkan dengan hak pemilikan barang sesuai syarat penyerahan pada saat transaksi yang meliputi (Waluyo 2016, 92) :

1. Barang dalam perjalanan

Pemilikan barang ini sangat bergantung pada syarat penyerahannya. Kemungkinan biaya pengangkutan ditanggung pembeli, maka barang tersebut menjadi milik pembelian, demikian pula sebaiknya.

2. Barang titipan

Barang komisi yang belum terjual jelas milik pihak yang menitipkan barang. Ditinjau dari pihak yang menitipkan, barang tersebut sering disebut barang konsinyasi.

Pembagian tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi pada praktik akuntansi komersial dan persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Dengan demikian, biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan tersebut berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.

Dalam usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 (lima) jenis persediaan (Agoes 2013, 54), yaitu :

a. Bahan baku dan bahan pelengkap

Biaya perolehan bahan baku terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Bahan baku masih dapat digolongkan kedalam bahan baku langsung dan bahan pembantu. Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk, misalnya bahankayu untuk pembuatan lemari. Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk,

seperti minyak pelumas atau kertas amplas. Bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk.

b. Barang dalam pengolahan

Barang dalam pengolahan adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya.

c. Barang Jadi

Barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, dalam perjalanan atau yang dititipkan kepada pihak lain. Barang-barang yang tidak dapat lagi dijual atau digunakan untuk produksi tidak digolongkan kedalam persediaan. Persediaan semacam ini dimasukkan sebagai bagian aset lain-lain.

d. Barang dalam perjalanan

Barang dalam perjalanan adalah barang yang dikirimkan atas dasar *FOB Shipping Point* yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli

dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Apabila tidak diperhitungkan maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah dicatat dalam neraca serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu rendah dicatat dalam laporan laba rugi.

e. Barang konsinyasi

Barang konsinyasi adalah barang yang telah diserahkan kepada *consignee* tetapi merupakan kepemilikan dari *consignor* dan dimasukkan dalam persediaan *consignor* sebesar harga beli atau biaya produksi. *Consigned goods* akan diungkapkan dalam catatan tersendiri. *Consignee* harus hati-hati agar tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai bagian dari persediaan.

Dalam pengukuran persediaan bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Biaya persediaan itu meliputi (Waluyo 2016, 93) :

1. Biaya pembelian

Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.

Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

2. Biaya konversi

Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, contoh biaya tenaga kerja langsung termasuk juga alokasi sistematis *overhead* produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi.

3. Biaya-biaya lain

Biaya lain yang dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul, agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai dibawah biaya menjadi nilai realisasi bersih, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.

Menurut penelitian (Fahrani, Nurlaela, Chomsatu 2018), intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan

biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpangan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang. PSAK No. 14 (Revisi 2017) mengatur biaya tambahan yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dilihat dalam tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Renidyah Putri, Moh. Rafki Nasar, Kurnia (2018)	Pengaruh CSR, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Variabel X : 1. CSR 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan Variabel Y : Agresivitas Pajak	1. CSR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2. Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
2	Meita Fahrani, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2017-2018)	Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak	Variabel X : 1. Kepemilikan Terkonsentrasi 2. Ukuran Perusahaan 3. Leverage 4. Capital Intensity 5. Inventory Intensity Variabel Y : 1. Agresivitas Pajak	1. Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 4. Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 5. Inventory Intensity berpengaruh

				terhadap Agresivitas Pajak
3	Ika Nurjanah, Jeni Susyanti, Agus Salim (2019)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Terhadap Tax Planning	<p>Variabel X :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leverage 2. Profitabilitas 3. Ukuran Perusahaan 4. Proporsi Kepemilikan <p>Variabel Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Planning 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Planning 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Planning 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Planning 4. Proporsi Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Tax Planning
4	Dewi Kusuma Wardani, Desifa Kurnia Santi (2018)	Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, dan CSR terhadap Manajemen Laba	<p>Variabel X :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Planning 2. Ukuran Perusahaan 3. CSR <p>Variabel Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Planning tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 3. CSR berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba
5	Diana Lestari (2015)	Pengaruh Corporate Governance dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak	<p>Variabel X :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dewan Komisaris 2. Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Pajak 2. Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak 3. Komite Audit

			<p>5. Intensitas Persediaan</p> <p>Variabel Y :</p> <p>1. Manajemen Pajak</p>	<p>berpengaruh terhadap Manajemen Pajak</p> <p>4. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak</p> <p>5. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak</p>
6	Risa Mewanda Pangabean (2018)	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate</p>	<p>Variabel X :</p> <p>1. Ukuran Perusahaan</p> <p>2. Leverage</p> <p>3. Profitabilitas</p> <p>4. Intensitas Aset Tetap</p> <p>5. Intensitas Persediaan</p> <p>6. Komisaris Independen</p> <p>Variabel Y :</p> <p>1. Effective Tax Rate</p>	<p>1. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p> <p>2. Leverage berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p> <p>3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p> <p>4. Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p> <p>5. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p> <p>6. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate</p>

7	Rini Handayani (2018)	Pengaruh Return On Asset, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Variabel X : 1. Return On Asset 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan Variabel Y : 1. Tax Avoidance	1. Return On Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance
---	-----------------------	---	---	--

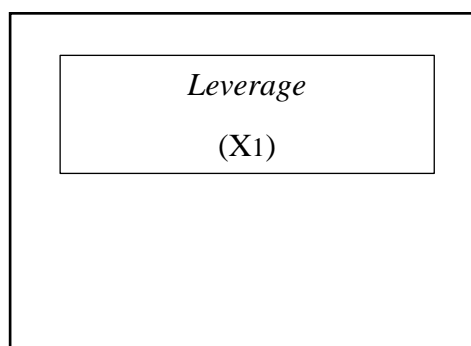
Sumber : Data diolah peneliti.

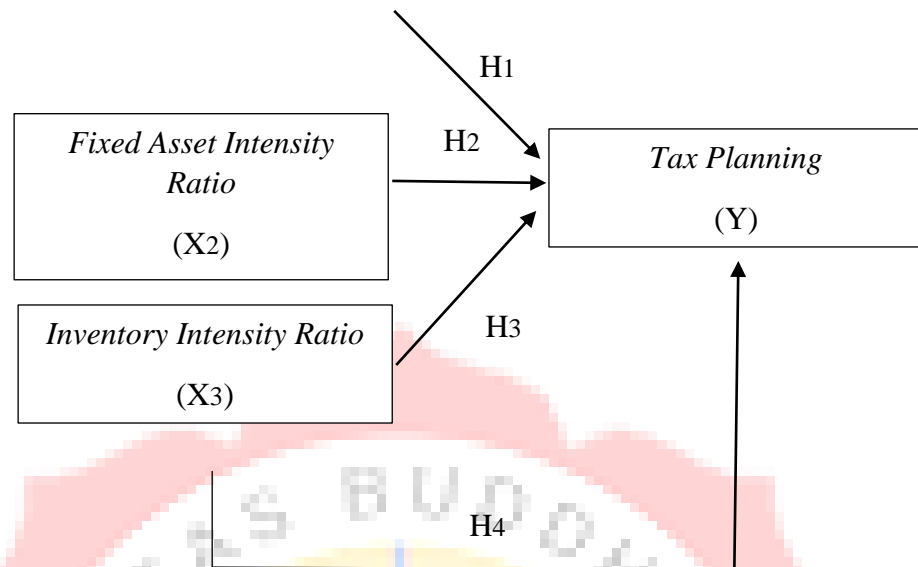
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian digambarkan bagaimana hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen. Variabel Independen pada penelitian ini adalah *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio*. Sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Planning*. Kerangka Penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran





D. Perumusan Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu hubungan sebab akibat suatu masalah yang akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan menguji atau mengolah data-data yang telah diperoleh. Hubungan sebab akibat yang ada merupakan variabel-variabel yang diwujudkan dalam pernyataan.

1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Planning*

Leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak. Mereka memiliki kemampuan modal yang besar, yang menandakan bahwa dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan perusahaan yang berasal dari kreditor juga besar. Hal ini membuat perusahaan akan mengeluarkan pembayaran biaya bunga yang ditimbulkan dari utang tersebut sehingga biaya bunga inilah yang akan membuat beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Planning*

2. Pengaruh *Fixed Asset Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*

Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya beban penyusutan tiap tahunnya terhadap aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi, semakin tinggi tingkat aset tetap suatu perusahaan maka beban penyusutan yang dikenakan juga akan semakin besar. Dengan besarnya beban penyusutan ini akan mengurangi jumlah laba perusahaan, dan nantinya juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Fixed Asset Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Planning*

3. Pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*

Intensitas persediaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Intensitas persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini dibuktikan adanya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima perusahaan.

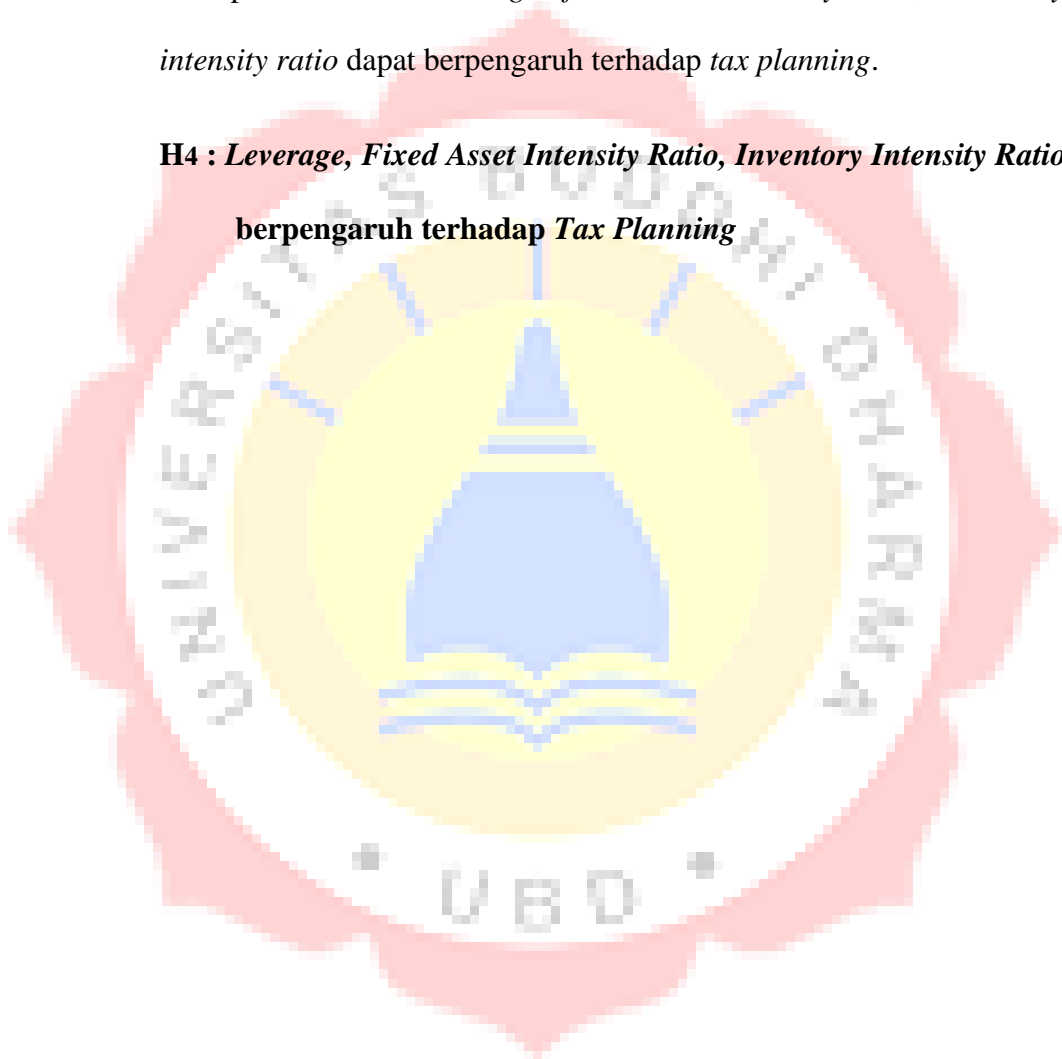
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Planning*

4. Pengaruh *Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Planning*

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya ketiga variabel independen tersebut diduga berpengaruh terhadap *tax planning*. Maka dapat diduga jika variabel diuji secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka hasilnya akan berpengaruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *leverage, fixed asset intensity ratio, inventory intensity ratio* dapat berpengaruh terhadap *tax planning*.

H4 : *Leverage, Fixed Asset Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Planning*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau gejala yang sedang diteliti untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menolak atau mendukung suatu teori dimana dilakukan dengan menggunakan deret ukur matematis hingga menemukan kesimpulan tertentu.

B. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. Objektivitas berkenaan dengan kesepakatan banyak orang, hal ini berarti semakin banyak orang yang memberi data atau informasi yang sama, maka data tersebut menjadi data yang objektif (Sugiyono 2017, 3).

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap *Tax Planning* yang terdiri dari 3 variabel yaitu *Leverage*, *Fixed Asset Intensity Ratio* dan *Inventory Intensity Ratio*.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Berdasarkan jenisnya, menurut (Sugiyono 2017, 7) mengatakan bahwa, jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Data dalam penelitian ini tentunya adalah data yang perhitungannya akan berhubungan dengan *leverage*, *fixed asset intensity ratio*, *inventory intensity ratio* terhadap *tax planning*.

Menurut (Sugiyono 2017, 137) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data perusahaan yaitu Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono 2017, 80) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017 yaitu sebanyak 48 perusahaan.

Menurut (Sugiyono 2017, 81) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu dengan teknik *non probability sampling* dimana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya didalam teknik *non probability sampling* ini, penulis menggunakan teknik *sampling purposive* yang artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel ini yaitu :

1. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017.
2. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang selalu mempublikasikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017.
3. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2017.
4. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1 (satu) triliun rupiah.
5. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang tidak mengalami *delisting*. Hal ini merupakan penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan yang mengalami hal ini tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat.
6. Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang mengalami data *outlier*. Data ini adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data.

Tabel 3.1
Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

No	Kriteria <i>Purposive Sampling</i>	Jumlah
1	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017	48
2	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017	(3)
3	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang mengalami kerugian selama periode 2015-2017	(10)
4	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang memiliki kapitalisasi pasar kurang dari 1 (satu) triliun rupiah	(7)
5	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang mengalami <i>delisting</i>	(3)
6	Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate yang mengalami data <i>outlier</i>	(6)
Sampel yang memenuhi kriteria		19

Sumber : Data diolah peneliti.

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas, maka diketahui bahwa perusahaan jasa subsektor property dan real estate yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 19 perusahaan.

Nama dan kode emiten perusahaan-perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Daftar Nama dan Kode Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
3	BKSL	Sentul City Tbk
4	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
5	CTRA	Ciputra Development Tbk
6	DMAS	Puradelta Lestari Tbk
7	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
8	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
9	GMTD	Gowa Makassar Tourist Development Tbk
10	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
11	JRPT	Jaya Real Property Tbk
12	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
13	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
15	MDLN	Moderland Realty Tbk
16	MTLA	Metropolitan Land Tbk
17	PWON	Pakuwon Jati Tbk
18	RDTX	Roda Vivatex Tbk
19	SMRA	Summarecon Agung Tbk

Sumber : Data diolah peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data perusahaan berupa data historis perusahaan sub sektor property dan real estate, studi literatur, karangan ilmiah, serta referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data historis perusahaan berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2015-2017.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu :

a) Studi Pustaka

Penulis menggunakan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b) Studi Dokumenter

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh penulis yang berupa laporan keuangan perusahaan dari masing-masing

perusahaan, penulis memperoleh dari www.idx.co.id yang merupakan website resmi Bursa Efek Indonesia.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu, variabel dependen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Terdapat 3 (tiga) variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu *leverage*, *fixed asset intensity ratio*, dan *inventory intensity ratio*. Sedangkan untuk variabel dependen (Y) dalam penelitian ini hanya ada 1 (satu) yaitu *tax planning*. Berikut akan dijelaskan masing-masing variabel pada bagian selanjutnya.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *tax planning*. *Tax Planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial. Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan (*tax saving*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian ini, *tax planning* dapat diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). ETR dinilai lebih efektif untuk menilai apakah suatu perusahaan terindikasi melakukan perencanaan pajak atau tidak, yaitu semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya perencanaan pajak dalam perusahaan. ETR dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan.

Effective Tax Rate perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah *leverage*, *fixed asset intensity ratio*, dan *inventory intensity ratio*.

2.1 *Leverage*

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur. *Leverage*

atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya (Wahyuni 2018).

Variabel ini diukur dengan menggunakan proksi *debt to asset ratio* (DAR). DAR mencerminkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang besar akan menimbulkan beban tetap (biaya bunga) yang cukup besar. Semakin besar penggunaan utang maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang mengarah kepada kebangkrutan.

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan beban bunga dari utang dapat

dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil dan menyebabkan pajak yang dibayar menurun.

DAR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 *Fixed Asset Intensity Ratio* (Rasio Intensitas Aset Tetap)

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap didalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan proksi intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dan total aset suatu perusahaan (Fahrani, Nurlaela, Chomsatu 2018).

Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 *Inventory Intensity Ratio (Rasio Intensitas Persediaan)*

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Fahrani, Nurlaela, Chomsatu 2018). Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio operasional variabel dapat dilihat dalam tabel

3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
<i>Tax Planning</i> (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
<i>Leverage</i> (X1)	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
<i>Fixed Asset Intensity Ratio</i> (X2)	$FAIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
<i>Inventory Intensity Ratio</i> (X3)	$IIR = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS versi 25. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali 2018, 19).

2. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi (Gemilang 2017, 64). Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. **Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali 2018, 161) mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* (P-Plot) yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali 2018, 107) mengatakan bahwa, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel yang independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10. Hal ini berarti jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi. Dasar pengambilan keputusan tersebut sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance value* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi masalah multikolinieritas.
2. Jika nilai *tolerance value* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali 2018, 111) mengatakan bahwa, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena adanya residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Langkah untuk menilai d dihitung dengan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu :

Tabel 3.4

Klasifikasi Nilai d

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali 2016, 134) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan cara melihat *scatter plot*, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali 2016, 153) mengatakan bahwa analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih *independen variable* terhadap *dependen variable*. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara *leverage, fixed asset intensity ratio, inventory intensity ratio* dengan *tax planning*. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1 DAR + \beta_2 FAIR + \beta_3 IIR + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate (Tax Planning)*

α : Konstanta

β_{1-3} : Koefisien regresi untuk setiap variabel X

DAR : *Leverage*

FAIR : *Fixed Asset Intensity Ratio*

IIR : *Inventory Intensity Ratio*

ε : Standar Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali 2018, 97) mengatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Menurut (Toifah 2016, 87) pedoman dalam memberikan nilai interpretasi koefisien adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Interpretasi Koefisien

No	Interprestasi Koefisien	Tingkat Keeratan
1	0,00 – 0,20	Sangat Lemah
2	0,21 – 0,40	Lemah
3	0,41 – 0,70	Kuat
4	0,71 – 0,90	Sangat Kuat
5	0,91 – 0,99	Kuat Sekali
6	1	Sempurna

b. Uji Simultan F

Menurut (Ghozali 2018, 98) mengatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik F menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa

semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Cara menghitung uji F menggunakan ftabel yaitu dengan menggunakan rumus : $Df (N1) = k-1$ dan $Df (N2) = n-k$

Keterangan : n = banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian.

k = banyaknya variabel X yang digunakan.

c. Uji Parsial t

Menurut (Ghozali 2018, 98) mengatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol atau ($H_0 : \beta_i = 0$), artinya bahwa apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu

variabel tidak sama dengan nol atau ($H_a : b_i \neq 0$), artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

1. Bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 %, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bilai nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Cara menghitung uji t menggunakan tabel yaitu dengan menggunakan rumus : $Df = n - k - 1$.

Keterangan : n = banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian.

k = banyaknya variabel X yang digunakan.

